

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2017.
- Amin, Erham. *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020.
- Asmar, Lanka, Samsul Fadli. *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- A. Z. Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fahrazi, Mahfud, Hasyim Nawawie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atmapustaka, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2008.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kanter, E. Y., S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, 2012.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kholiq, M. Abdul. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002

- Kristian, Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyalahgunaan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aula, 2013.
- Lasmadi, Sahuri, Herman Suriyono. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Manullang, Herlina. Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPMUHN Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2015.
- Moeliono, Tristam Pascal. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2012.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Robert K., Aris Irawan. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Thafa Media, 2019.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Takariawan, Agus. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- Schaffmesiter, D., N. Keijzer dan P.H. Sutorius. *Hukum Pidana*. Liberty, 1995.

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sapardjaja, Komariah E. *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam hukum Pidana Indonesia; Studi Tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, 1990.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. Jurnal/Tesis/Disertasi

- Christianto, Hwian. "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2016. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/556/497>
- Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum". *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 1, No. 1, 2021. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11204>
- Jusuf, Marcelino M., Maarthen Y. Tampanguma, dan Franky R. Mewengkang. "Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Diluar Penegak Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 4, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42435>
- Jusuf, Virginia Agnes Theresia, Frans Maramis, dan Vicky F. Taroreh, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia". *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 3, 2020.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29839/28896>

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Postitum*, Vol. 5, No. 2, 2020. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

Girsang, Junimart, Florianus Yudhi Priyo Amboro, Rina S. Shahrullah, dan Novita. "Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia, Amerika, dan Australia". *University of Bengkulu Journal*, Vol. 6, No. 1, 2022. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/13096>

Khakim, Mufti. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2014. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9120>

Kurnia, Asep. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS>

Lasmadi, Sahuri. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia". Disertasi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya, 2003. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=6yvqa-kAAAAJ&citation_for_view=6yvqa-kAAAAJ:WF5omc3nYNoC

Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, 2019. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/1779>

Munawar, Kukun Abdul Syakur. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2, 2015. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/420>

Nababan, Dennys Megasari br, Sahuri Lasmadi, dan Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya", *PAMPAS: Journal Criminal of Law*, Vol. 4, No. 2, 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26981>

- Nasution, Eva Syahfitri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia". *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 1, 2015. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/641>
- Njoto, David Lind Budijanto. "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No. 3, 2024. <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3735>
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11204>
- Romandona, Rizki, Bukhari Yasin, "Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)". *Justitiable*, Vol. 6 No. 2, 2024. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/817>
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, dan Pujiono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3230>
- Saputra, Rian Prayudi. "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris", *Jurnal Pahlawan*". Vol. 3 No. 1, 2020. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/615519>
- Silaen, Febriyanti, Syawal Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana". *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/455>
- Yudhianto, Haris. "Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Karya Ilmiah Dosen*, Vol. 4, No. 2, 2018. <https://journal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/view/158>
- Yoserwan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Harta Kekayaan Dalam RUU KUHP Indonesia Sebagai Antisipasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/617>

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang–Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU. Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. *Undang–Undang Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134. TLNRI Nomor 4150.

Republik Indonesia. *Undang–Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008. LNRI Tahun 2008 Nomor 58. TLNRI Nomor 4843.

Republik Indonesia, *Undang–Undang Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 31 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 293. TLNRI Nomor 5602.

Republik Indonesia. *Undang–Undang Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 251. TLNRI Nomor 5952.

Republik Indonesia. *Undang–Undang Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 2023. LNRI Tahun 2023 Nomor 1. TLNRI Nomor 6842.

D. Internet

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

<https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/>